



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2018**

**Batang, Maret 2019**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG  
JALAN RAYA KANDEMAN KM. 05 BATANG 51261 JAWA TENGAH – TELP/FAX. (0285)  
391387

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Batang. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2018. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Batang di masa yang akan datang.

Batang, Maret 2019  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Batang



**Drs. MURDIYONO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620727 198607 1 001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR	-----	ii
DAFTAR ISI	-----	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	-----	iv
BAB I. PENDAHULUAN	-----	1
A. Gambaran Umum	-----	1
B. Permasalahan Utama yang dihadapi	-----	10
C. Maksud dan tujuan	-----	10
D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	-----	11
E. Sistematika Penyusunan LKjIP	-----	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	-----	13
A. Perencanaan Kinerja	-----	13
B. Perjanjian Kinerja	-----	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	-----	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	-----	16
B. Realisasi Anggaran	-----	19
BAB IV. PENUTUP	-----	24

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan visi Dinas Perhubungan yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang handal, dinamis, sinergis serta berdaya saing dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang yang Berkembang” untuk mencapai visi tersebut dan telah dirumuskan misi. Adapun misi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Batang adalah menyelenggarakan jaringan transportasi ke pelosok desa, dan dalam bidang perekonomian dapat meningkatkan pendapatan perkapita bagi masyarakat dengan cepat, tepat dan lancar dalam pengurusan bidang transportasi yang juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta pengembangan.

Pelaksanaan AKIP melalui indikator kinerja dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan pengukuran kinerjanya merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolaan data / informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program dan kebijakan. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 dari hasil evaluasi dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, diperoleh nilai capaian rata – rata.

Pada Akuntabilitas Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk target dan realisasi seimbang dan dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Untuk strategi pemecahan masalah guna tercapainya visi yang telah ditentukan diperlukan perbaikan – perbaikan setiap misi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN**

#### a. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana dalam membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- f. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- g. pengelolaan manajemen perparkiran;
- h. pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- j. pengendalian teknis di bidang perhubungan;
- k. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- l. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;
- n. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang sebagai berikut :

#### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaiaan dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dishub;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan bidang angkutan darat, keterminalan, angkutan laut, dan kepelabuhanan serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang angkutan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang angkutan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan darat dan keterminalan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. pelaksanaan rekomendasi teknis di bidang angkutan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Angkutan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### C. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang keselamatan dan teknik sarana;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keselamatan dan teknik sarana;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;
- f. pelaksanaan rekomendasi teknis dibidang keselamatan dan teknik sarana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### D. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

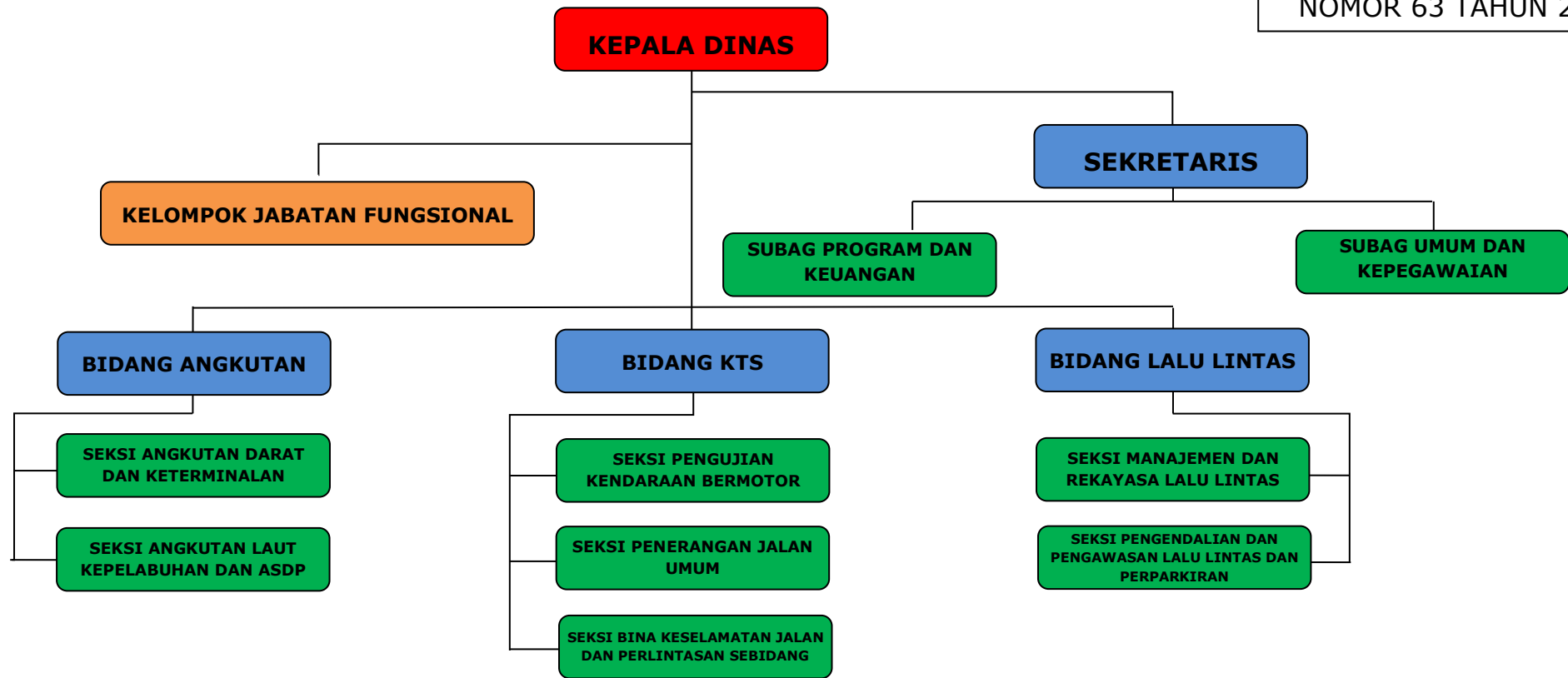
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pernantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan lalu lintas, dan perparkiran;
  - e. pelaksanaan rekomendasi teknis di Bidang Lalu Lintas;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Struktur Organisasi
- a. Kepala Dinas,
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
    - 1) Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; dan
    - 2) Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
    - 3) Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.
  - e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai berikut :



### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

BERDASARKAN PERBUP  
NOMOR 63 TAHUN 2016

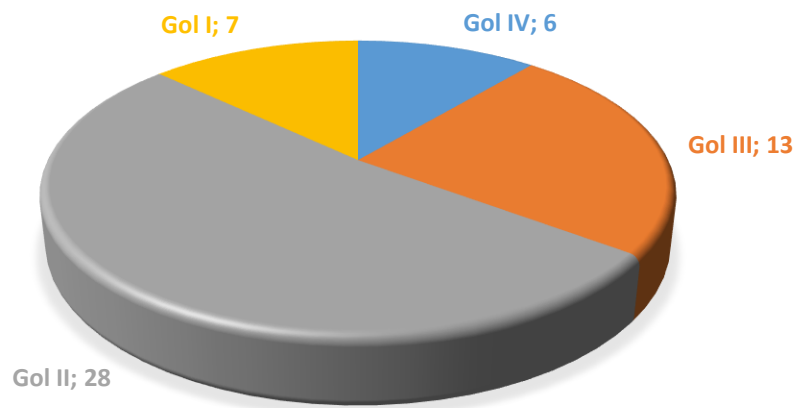


c. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018 berjumlah 54 orang dengan perincian sebagai berikut:

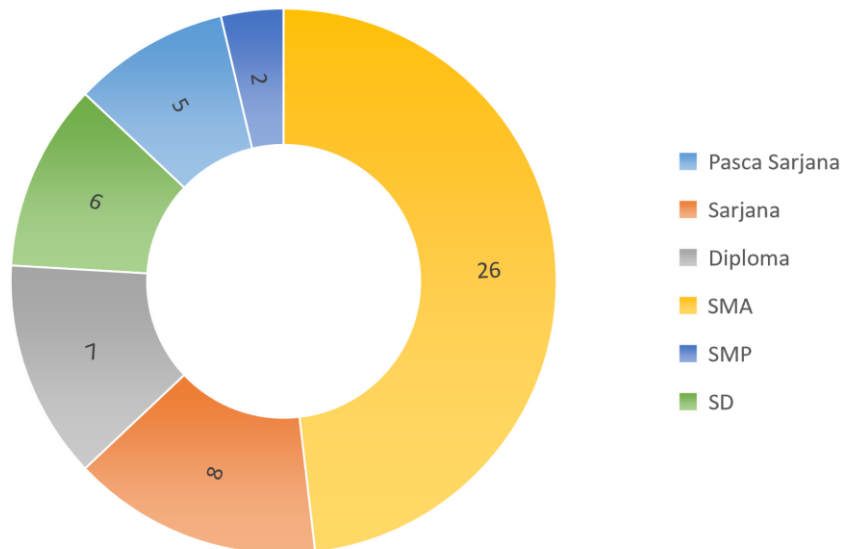
i. Menurut golongan

- a. Golongan IV : 6 orang
- b. Golongan III : 13 orang
- c. Golongan II : 28 orang
- d. Golongan I : 7 orang



ii. Menurut Pendidikan

- a. Pasca Sarjana : 5 orang
- b. Sarjana : 8 orang
- c. Diploma : 7 orang
- d. SMA : 26 orang
- e. SMP : 2 orang
- f. SD : 6 orang



iii. Menurut Eselon

- |    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| a. | Eselon II  | : | 1 orang  |
| b. | Eselon III | : | 4 orang  |
| c. | Eselon IV  | : | 9 orang  |
| d. | Staf       | : | 40 orang |

Jumlah karyawan / karyawan Non PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018 berjumlah 15 orang dengan perincian sebagai berikut:

i. Menurut Pendidikan

- |    |         |   |         |
|----|---------|---|---------|
| a. | Sarjana | : | 3 orang |
| b. | Diploma | : | -       |
| c. | SMA     | : | 3 orang |
| d. | SMP     | : | 3 orang |
| e. | SD      | : | 6 orang |

Jumlah karyawan / karyawan kontrak di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018 berjumlah 92 orang.

Rekapitulasi jumlah pegawai dinas perhubungan Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017**

NO	BAGIAN/BIDANG	Gol. IV				JML	Gol. III				JML	Gol. II				JML	Gol. I				JML	JUMLAH PNS	GENDER		HONORER			JML	JUMLAH
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d			L	P	PP31	THL	Kontrak		
1	SEKRETARIAT	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	3	9	-	-	-	-	-	12	11	1	2	-	13	15	27
2	BIDANG ANGKUTAN	1	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	1	10	-	12	-	1	7	-	8	25	25	-	1	-	3	4	29
3	BIDANG KTS	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	1	3	1	6	-	1	-	-	1	11	11	-	2	-	59	61	72
4	BIDANG LALU LINTAS	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	5	-	-	-	-	-	8	7	1	2	-	2	4	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>84</b>	<b>140</b>

d. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sarana

➤ Tanah dan Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor Dinas Perhubungan	5.890 m <sup>2</sup>
2.	Bangunan Terminal Bandar	600 m <sup>2</sup>
3.	Bangunan Terminal Banyuputih	18.430 m <sup>2</sup>
4.	Bangunan Pangkalan Penundan	12.500 m <sup>2</sup>
5.	Bangunan Terminal Bawang	3.780 m <sup>2</sup>
6.	Bangunan Terminal Limpung	6.440 m <sup>2</sup>

➤ Kendaraan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Truk crane	1 unit
3.	Truk + attachment	1 unit
4.	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1 unit
5.	Sepeda motor	34 unit

b. Prasarana

➤ Peralatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Alat bengkel dan alat ukur	53 unit
2.	Alat kantor dan rumah tangga	479 unit
3.	Alat studio dan alat komunikasi	54 unit

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan dan jembatan
2. Bangunan air / irigasi
3. Instalasi listrik
4. Jaringan Listrik

e. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.350.363.650,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 36.789.196.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3  
 Anggaran Belanja 2018  
 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.350.363.650,00
2	Belanja Langsung :	Rp. 36.789.196.000,00
	- Belanja Pegawai	Rp. 544.210.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 24.965.817.000,00
	- Belanja Modal	Rp. 11.279.169.000,00
	Jumlah	Rp. 41.139.559.650,00

## B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Kekurangan sumber daya manusia terampil, baik dari kualitas maupun jumlah.
3. Anggaran APBD yang terbatas, sehingga berdampak pada pelayanan yang kurang optimal.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pelatihan / diklat bagi sumber daya manusia perhubungan.
2. Kekurangan sumber daya manusia yang terampil dibidang perhubungan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja tersebut disusun berdasarkan

dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

#### **D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP DINAS PERHUBUNGAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Realisasi Anggaran

Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017 - 2022 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2017 - 2022 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Batang.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Batang yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenram dan Sejahtera pada tahun 2022".

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Bupati terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Batang.

Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang merupakan organisasi perangkat daerah teknis dibidang Perhubungan mendukung pembangunan daerah yang telah dicanangkan dalam visi dan misi Bupati tersebut. Dalam pencapaian visi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Batang diberi tugas untuk melaksanakan tujuan pada misi 3 yaitu :

*Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.*

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah Kabupaten Batang. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, dan berkeselamatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yaitu :

1. Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah.
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah	Rasio ijin trayek
			Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu
				Pemasangan penerangan jalan umum
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
				Persentase penurunan angka kecelakaan

## B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2017 – 2022.

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan  
Kabupaten Batang Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah	Rasio ijin trayek	67%
2	Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu	22,4%
		Pemasangan penerangan jalan umum	39%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	60%
		Persentase penurunan angka kecelakaan	2%

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (PK) Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Berhasil/sangat baik
75 s/d 100%	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 75%	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2018, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah	Rasio ijin trayek	67%	68%	101,5%
2	Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu	22,4%	20%	89,3%
		Pemasangan penerangan jalan umum	39%	37,98%	97,4%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	60%	65%	108,3%
		Persentase penurunan angka kecelakaan	2%	1,05%	52,5%
Rata-rata capaian IKU					89,9%

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2018 adalah sebesar 89,9% atau kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2018 adalah Cukup Berhasil / cukup baik. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah.

Tujuan tersebut mencakup sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan kegiatan :

- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
  - Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
  - Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal
- 2) Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas
- Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan :
    - Pengadaan rambu rambu lalu lintas
    - Pengadaan pagar pengaman jalan
    - Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
  - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
    - Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan
    - Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan
  - c. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
    - Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
    - Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
  - d. Program peningkatan pelayanan angkutan
    - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
    - Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
    - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan
    - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
    - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
    - Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan
  - e. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
    - Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan
  - f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    - Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi		%
				2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas mobilitas antar wilayah	Rasio ijin trayek	67%	68%	n/a	
2	Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu	22,4%	20%	n/a	
		Pemasangan penerangan jalan umum	39%	37,98%	n/a	
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	60%	65%	n/a	
		Persentase penurunan angka kecelakaan	2%	1,05%	n/a	
Rata-rata capaian IKU					n/a	

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran	19.335.500.000	18.598.617.483	96,19
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.500.000	5.370.000	82,62
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.148.750.000	17.497.624.288	96,41
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	220.000.000	213.620.000	97,10
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	20.000.000	18.827.075	94,14
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.000.000	86.829.000	86,83

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	57.695.300	96,16
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	379.250.000	331.404.800	87,38
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	75.000.000	69.256.000	92,34
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	5.808.000	96,80
10.	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000	44.177.000	88,35
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000	173.105.020	98,92
12.	Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD	95.000.000	94.901.000	99,90
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.581.000.000	1.495.302.841	94,58
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150.000.000	148.749.000	99,17
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000	143.107.000	95,40
3.	Pengadaan mebeleur	75.000.000	74.837.000	99,78
4.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	150.000.000	147.571.000	98,38
5.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	394.800.000	384.928.930	89,19
6.	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	85.000.000	84.764.500	99,72
7.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	24.935.000	99,74
8.	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	15.000.000	14.675.000	97,83



No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor	360.000.000	347.384.500	96,50
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	150.000.000	148.896.000	99,26
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150.000.000	148.896.000	99,26
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.050.000	6.884.800	97,66
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.050.000	6.884.800	97,66
V.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	410.100.000	342.261.500	83,46
1.	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	315.000.000	252.310.000	80,10
2.	Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	95.100.000	89.951.500	94,59
VI.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	2.450.000.000	2.380.840.100	97,18
1.	Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan	1.700.000.000	1.642.709.600	96,63
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	750.000.000	738.130.500	98,42
VII.	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.089.450.000	919.374.941	84,39
1.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan rayapenumpang	467.050.000	424.253.941	90,84

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100.000.000	82.183.000	82,18
3.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	177.500.000	160.823.000	90,60
4.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	150.000.000	82.861.000	55,24
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	44.900.000	30.381.000	67,66
6.	Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	150.000.000	138.873.000	92,58
VIII.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	69.000.000	66.000.000	95,65
1.	Pembangunan pelabuhan dan akses jalan	69.000.000	66.000.000	95,65
X	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.009.450.000	2.716.232.900	90,26
1.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	321.500.000	306.087.800	95,21
2.	Pengadaan pagar pengaman jalan	2.625.000.000	2.364.519.100	90,08
3.	Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN)	62.950.000	45.626.000	72,48
IX.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	692.646.000	569.682.192	82,25
1.	Pengadaan alat uji petik kendaraan bermotor	270.960.000	243.051.000	89,70
2.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	342.000.000	251.668.192	73,59
3.	Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal	79.686.000	74.963.000	94,07

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
X.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7.995.000.000	7.361.008.910	92,07
1.	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	7.995.000.000	7.361.008.910	92,07
TOTAL		36.789.196.000	34.605.101.667	94,06

Dari tabel realisasi anggaran diatas dapat dilihat capaian kinerja anggaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagian besar berada pada kisaran antara 80% - 99% dan sebagian berada pada kisaran 55% - 79%, dengan rata-rata pencapaian 94,06%.

Penyerapan anggaran terendah ada pada kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu dengan realisasi 55,24%. Hal tersebut karena adanya pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu keikutsertaan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Karna tidak lolos verifikasi. Sedangkan realisasi tertinggi ada pada kegiatan Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD yaitu sebesar 99,90%.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang menyadari bahwa dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government).

Simpulan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 dan langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

### **Simpulan :**

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Cukup baik yakni dengan persentase 89,9%.

### **Langkah yang akan dilakukan :**

1. Melanjutkan progres yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
2. Membuat perencanaan program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target indikator sasaran.
3. Meningkatkan kinerja agar sasaran yang akan dicapai paling tidak sama atau bahkan bisa melebihi dari tahun sebelumnya.